

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Negara Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang. Untuk membangun negara Indonesia haruslah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan-tujuan seperti yang disebutkan di atas, pemerintah membuat anggaran negara untuk melaksanakan pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Anggaran negara yang dibuat disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara. Pada saat sekarang ini, negara Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Sedangkan pembangunan nasional memerlukan dana yang besar. Hal ini sangat berhubungan dengan tujuan pembangunan nasional kita yaitu, mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,

tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Dana-dana yang dibutuhkan oleh negara adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk memperoleh dana tersebut, pemerintah dapat melakukan dengan cara mencetak uang ataupun meminjam dari negara lain. Akan tetapi, apabila terus menerus dilakukan dengan cara tersebut, maka akan terjadi hutang yang terus meningkat dan inflasi yang tinggi. Apalagi di masa krisis moneter sekarang ini, terutama dilihat dari nilai rupiah terus menurun terhadap mata uang Dollar Amerika membuat perekonomian negara Indonesia semakin terpuruk.

Mencetak uang dan meminjam dari negara lain hanyalah merupakan beberapa sumber bagi pemerintah untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber penghasilan negara yang dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu :

- a. Dari perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli maupun yang tidak bersifat monopoli.
- b. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya.
- c. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
- d. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak

atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia, sesuai dengan pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS), maka harta peninggalan tersebut dianggap harta peninggalan terlantar. Dan jika setelah dalam waktu tiga tahun masih belum ada ahli waris yang muncul, maka Badan Harta Peninggalan wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal masih ada kelebihan, harta peninggalan atau warisan ini menjadi milik negara.

- e. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, misalnya sumbangan dari PBB.
- f. Iuran dari masyarakat, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan.

Dari berbagai macam sumber pemasukan bagi negara, sektor pajak merupakan sumber yang paling konsisten apabila semua warga negara menyadari kewajibannya membayar pajak. Untuk mewujudkan penerimaan sektor pajak sebagai penerimaan yang konsisten bagi suatu negara, diperlukan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat.

Di dalam suatu negara, perpajakan memegang peranan penting bagi penunjangan pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, penggunaan atas hasil pemungutan pajak telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.”

Negara-negara yang telah maju menyadari pentingnya pemungutan pajak dari masyarakat bagi keperluan pembiayaan pembangunan. Bahkan seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakatnya, negara-negara maju dengan segera menyesuaikan peraturan-peraturan perpajakan untuk menambah kas bagi negara.

Kesadaran masyarakat Indonesia, di dalam pembayaran pajak bagi kas negara, sangatlah kurang. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja menutupi besarnya pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini sangat merugikan bagi negara. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, selain merupakan kewajiban sebagai warga negara, juga merupakan sebagai tanda bakti masyarakat kepada negara karena masyarakat secara langsung aktif dalam pembiayaan pembangunan negara.

Pajak juga dipungut dari perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan merupakan dasar bagi pemerintah untuk memungut pajak. Bagi perpajakan, yang paling memegang peranan dalam laporan keuangan di dalam mengetahui besar kecilnya pajak yang harus dibayar adalah laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi akan memberikan informasi mengenai besarnya laba dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Besarnya laba akan menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayar.

Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan atau badan usaha untuk membuat pembukuan. Pembukuan ini menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Pendapatan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang dan jasa guna perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pembukuan di dalam perpajakan tercantum dalam UU PPh No. 9 Tahun 1994 Pasal 1 Huruf v yaitu :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba setiap tahun Pajak berakhir;

Akan tetapi informasi laba yang tersaji dalam laporan keuangan, khususnya laporan perhitungan rugi laba, bukanlah berarti sama dengan pendapatan kena pajak atau laba fiskal. Itulah sebabnya, penulis akan menguraikan hal-hal yang menyebabkan perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal serta penyajiannya dalam laporan keuangan skripsi ini yang berjudul :

“ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN”

1.2 Perumusan Permasalahan

Pada umumnya masyarakat mempunyai anggapan bahwa laba dalam laporan keuangan merupakan laba fiskal suatu perusahaan. Hal ini keliru, karena ada beberapa hal yang menjadi pokok perbedaan di dalam menghitung laba akuntansi dan laba fiskal.

Di dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi. Akan tetapi, kadang-kadang prinsip-prinsip ini justru tidak sesuai dengan kepentingan perpajakan. Kepentingan perpajakan adalah memungut pajak dari Penghasilan Kena Pajak. Pajak yang dipungut tentu diusahakan besar karena bagi pemerintah, pungutan pajak tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan untuk

kas negara yang digunakan sebagai pembiayaan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada umumnya tujuan bagi perusahaan adalah memperoleh tingkat laba yang tinggi. Akan tetapi hal ini berarti Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan juga besar sehingga akan mengurangi laba bersih yang diperoleh.

Dilihat dari perumusan di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa perbedaan dari perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal yaitu :

1. Penerapan prinsip akuntansi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kepentingan perpajakan.
2. Unsur-unsur pendapatan dan biaya yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi dan pendapatan kena pajak berbeda.

Maksudnya adalah terdapat transaksi-transaksi dimana di dalam akuntansi diakui sebagai pendapatan atau biaya diakui, tetapi tidak diakui di dalam perpajakan.

Demikian juga sebaliknya, terdapat transaksi-transaksi yang diakui di dalam perpajakan, tetapi tidak diakui dalam akuntansi.

3. Perbedaan waktu terhadap pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba antara akuntansi dan perpajakan.

Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut perpajakan, pendapatan atau biaya tersebut belum dapat diakui.

Demikian juga sebaliknya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena akan tertutup periode sesudahnya.

Karena itulah, penulis akan mencoba menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut dalam skripsi ini. Selain itu, penulis akan menjelaskan pengaruh perbedaan-perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberi gambaran kepada para pembaca mengenai unsur-unsur dari perhitungan laba akuntansi dan pendapatan kena pajak.
2. Untuk memberi penjelasan kepada pembaca mengenai perbedaan-perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam perhitungan laba akuntansi dan pendapatan kena pajak.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat di dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di STIE MUSI.

Dan juga diharapkan penulisan skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca didalam memahami perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

1.4 Metodologi Penulisan

Di dalam menyusun penulisan skripsi ini, digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1.4.1. Ruang Lingkup

Akuntansi merupakan alat bantu bagi perpajakan di dalam memberikan informasi keadaan keuangan suatu perusahaan yang merupakan objek pajak. Akan tetapi, di dalam penulisan skripsi ini, hanya membatasi mengenai perbedaan-perbedaan di dalam perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal.

1.4.2. Sumber dan Pengumpulan Data

Di dalam melakukan penulisan, diperlukan data-data yang mendukung. Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi di sekitar kita.

Di dalam buku Metodologi Penelitian Ekonomi oleh Muhammad Teguh, sumber di dalam pengumpulan data dapat dikelompokkan seperti diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan sumber pengumpulan data, maka data dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diambil dari hasil studi perpustakaan, misalnya berupa bahan-bahan bacaan atau buku-buku pedoman. Data sekunder ini sering juga disebut dengan data eksternal.

2. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.

Data primer ini sering juga disebut dengan data mentah (*raw data*) atau yang berarti data yang masih harus diolah.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan saja, sedangkan data kuantitatif merupakan data statistik berupa angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Di dalam penulisan skripsi ini, akan lebih banyak mengambil dari sumber-sumber atau dari hasil studi perpustakaan. Jadi dapat dikatakan skripsi ini lebih banyak menggunakan data sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun bab-bab yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai pengertian akuntansi, pendapatan menurut PSAK No. 23, hubungan istimewa menurut

PSAK No. 7, pengertian perpajakan, serta akuntansi pajak penghasilan.

**Bab III : UNSUR-UNSUR DALAM PERHITUNGAN LABA AKUNTANSI
DAN LABA FISKAL**

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai unsur-unsur perhitungan laba akuntansi, laba fiskal, perbedaan-perbedaan permanen, perbedaan akibat pembebanan langsung atas laba yang ditahan, perbedaan waktu pembebanan, serta perbedaan penyajian laba akuntansi dan laba fiskal.

**Bab IV : ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN**

Di dalam bab ini menjabarkan analisa terjadinya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, penyajian Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan, serta penyajian laporan keuangan terhadap pajak penghasilan.